



**LAPORAN KINERJA  
( LKJ )  
TAHUN 2019**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan bentuk evaluasi untuk menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah di tetapkan.

Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi Kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) masih belum maksimal. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Madiun, Januari 2020

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

**AGUS HARIONO,S.Sos,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630807 198509 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan bentuk evaluasi untuk menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah di tetapkan.

Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi Kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) masih belum maksimal. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Madiun, Januari 2020

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN



**AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630807 198509 1 003

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta upaya mewujudkan good governance maka perlu disusun laporan kinerja yang merupakan aktualisasi semangat reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk lebih mendayagunakan aparatur negara, yaitu tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, juga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan akuntabel melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

## 1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Adapun tujuan penyusunan dari Pelaporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya ;
- d. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

## 1.4. Gambaran Umum OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Madiun dikandung maksud sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

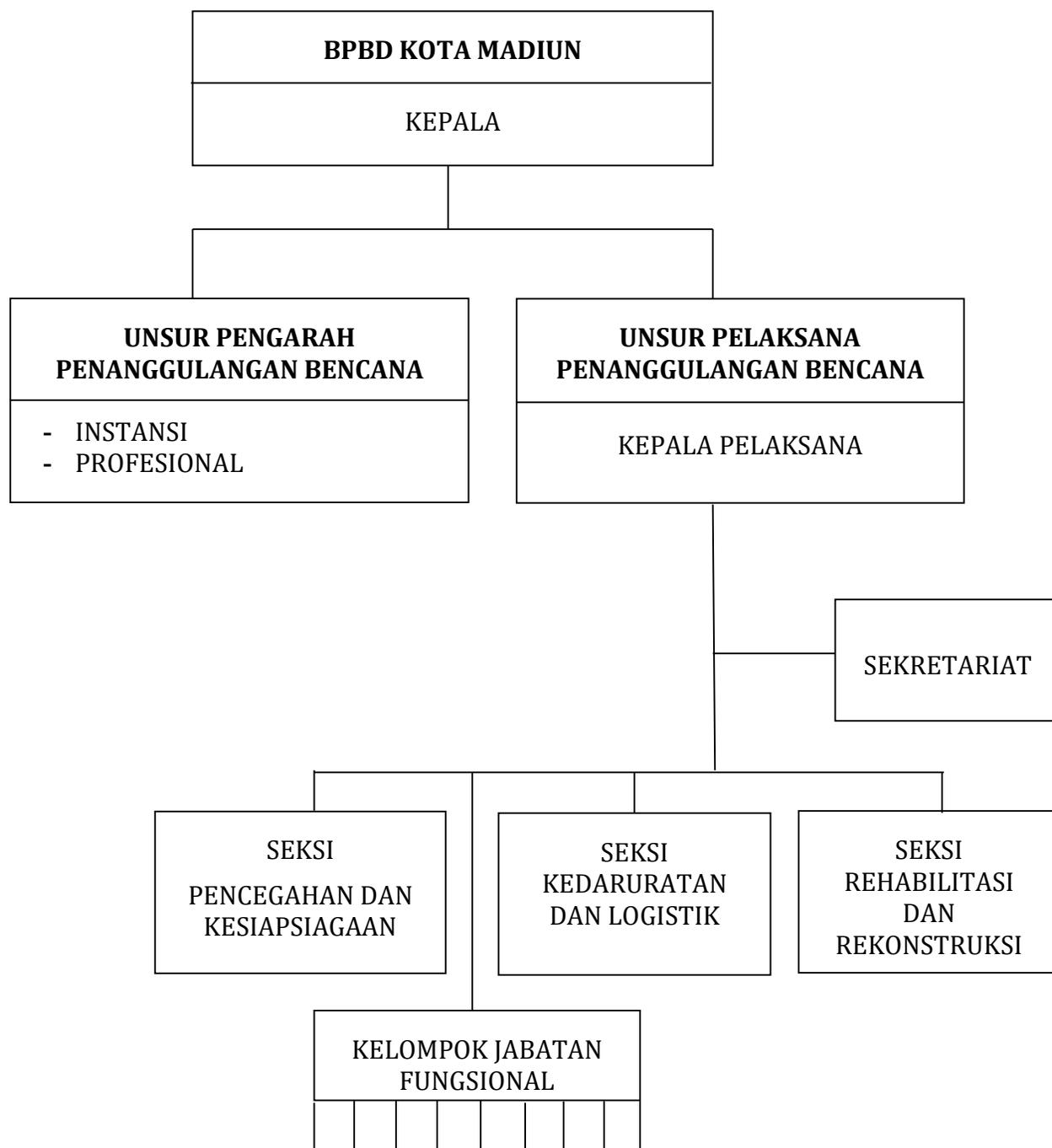
b. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Struktur Organisasi**

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terdapat Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN**



### Sumber Daya BPBD Kota Madiun

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di dukung oleh sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

- Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun saat ini memiliki atau di dukung oleh 8 (delapan) orang pegawai PNS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jumlah PNS		Jumlah Tenaga Kontrak		Pendidikan						Golongan					Jabatan / Eselon			
	L	P	L	P	S D	S M P	S M A	D 3	S 1	S 2	IV	III	II	I	TK	II	III	IV	Staf/Pelaksana
1.	6	2	0	0	0	0	5	0	1	2	1	5	2	0	0	0	1	3	4

Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki jumlah Pegawai sebanyak 8 (delapan) orang dan mayoritas berjenis kelamin Laki - laki yaitu 6 (enam) orang, sisanya Perempuan 2 (dua) orang.

Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar SMA/ sederajat sejumlah 5 (lima) orang, Sarjana Muda/D3 : 0 orang, Sarjana/S1 : 1 (satu) orang dan S2 : 2 (dua) orang.

Dari 8 (delapan) orang pegawai tersebut dilihat dari tingkat golongan, paling banyak terdiri dari Golongan III : 5 (lima) orang ; Golongan II : 2 (dua) orang ; Golongan IV : 1 (satu) orang.

Jabatan berdasarkan Eselon tersedia sebagai berikut : Eselon II : 0 (kosong), Eselon III : 1 ( satu ) orang, Eselon IV : 3 (tiga) orang dan Staf/Pelaksana sejumlah : 4 (empat) orang.

- Sarana Prasarana Kantor

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	1	Baik
2.	Peralatan	589	Baik
3.	Gedung	4	Baik
4.	Jalan Dan Jaringan ..... (lainnya)	3	Baik

## Isu Strategi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu seperti : banjir, puting beliung dan kebakaran yang penanggulangannya mendasar pada kearifan local dengan sumberdaya yang memadai ;
2. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara – cara menghadapinya serta kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan ;
3. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana ;
4. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana sehingga perlu ditingkatkan koordinasi di lintas SKPD dan Sektoral menjadi modal utama dalam penanganan bencana ;
5. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor ;
6. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau tempat evakuasi sementara (TES) ;
7. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana ;
8. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Madiun yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

Meskipun urusan pemadam kebakaran sudah tidak menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tetapi secara teknis apabila sewaktu-waktu ada laporan dari Call Center 112 ataupun laporan dari warga langsung telah terjadi kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan adanya Piket Siaga Bencana oleh para relawan siap membantu dan berperan aktif dalam penanganan darurat kebakaran.

#### Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan di Kota Madiun sesuai landasan perencanaan 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendasar pada aspek-aspek yang meliputi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas serta lingkup luas wilayah Kota Madiun.

Sebagai unsur pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas atau Instansi vertikal dan horizontal di daerah, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat darurat atau terjadinya bencana dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN**  
**PERJANJIAN KINERJA**

Keterkaitan antara RPJMD Tahun 2014-2019 dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

<b>Visi : Terwujudnya Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi 4</li> </ul> <p>Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan 2</li> </ul> <p>Mewujudkan stabilitas kehidupan social masyarakat yang dinamis dan kondusif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran 2</li> </ul> <p>Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan</p>

**2.1. Rencana Strategis Dan Rencana Kinerja Tahunan**

Perencanaan Pembangunan secara strategis mensyaratkan suatu proses penyusunan yang dilakukan secara komprehensif yaitu dengan memperhatikan aspek goeografis dan demografis termasuk pergerakan perubahan atau dinamika yang terjadi di dalam masyarakatnya.

Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kota Madiun telah menyusun suatu Perencanaan Strategis untuk Tahun 2014–2019 sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014–2019 juga sebagai acuan penyusunan program kegiatan selanjutnya.

Implikasi terbentuknya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah berupa perubahan paradigma penanggulangan terhadap bencana dari responsif menjadi penekanan pada proses mitigasi, sehingga “Mindset“ para pelaksana pembangunan diharapkan membuat perencanaan yang berwawasan aman bencana.

Sebagai bagian dari kewajiban terhadap Undang – Undang tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun diberi kewenangan untuk menangani kebencanaan.

Sehubungan hal tersebut guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menyusun langkah – langkah kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi

serta keadaan lingkungan yang dihadapi guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan dan sasaran kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014–2019 dan RKPD, juga harus sejalan dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai induk organisasi penanggulangan bencana di Jawa Timur.

a. Visi

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (LAN dan BPKP) yang dimaksud dengan visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.

Rumusan Visi suatu organisasi juga harus mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tujuan terluas dan terumum, termasuk semuanya yang berarti memperjelas arah yang akan dicapai organisasi ;
- b. Gambaran aspiratif di masa depan ;
- c. Inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik ;
- d. Pencapaian hasil dan ;
- e. Komunikasi pernyataan Misi dan persuasive pimpinan.

Visi itu merupakan suatu impian, untuk mewujudkannya harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan antara lain :

- a. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi ( Imaginable ) ;
- b. Memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi (Disinable) ;
- c. Memungkinkan untuk dicapai ;
- d. Terfokus pada permasalahan utama Instansi agar dapat beroperasi secara ekonomis, efektif dan efisien ;
- e. Berwawasan jangka panjang, tidak mangabaikan perubahan dan perkembangan.

Atas dasar beberapa kriteria atau persyaratan tersebut serta memperhatikan, mempertimbangkan Visi Pemerintah Kota Madiun maupun

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merumuskan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MADIUN YANG SIAP SIAGA, TANGGAP DAN TANGGUH MENGHADAPI BENCANA“.

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita – cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya untuk mewujudkan dan melaksanakan kebijakan maupun kegiatan yang diarahkan pada program kegiatan penanggulangan bencana sebagai hasil perumusan dan implementasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Siap siaga menghadapi bencana adalah bahwa pada saat ini konsep penanggulangan bencana telah mengalami perubahan yang mendasar.

Pemaknaan terhadap bencana yang secara konvensional dianggap sebagai sebuah kejadian yang tidak dapat dicegah, kemudian mengalami pergeseran makna bahwa bencana dapat diduga sebelumnya sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko.

Tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana adalah **“tanggap“** berarti peka atau paling tidak mengenali gejala – gejala atau potensi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. **“Tangguh“** berarti memiliki ketahanan (resilience) dalam menghadapi resiko bencana yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan seoptimal mungkin ketika bencana terjadi.

#### b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Oleh sebab itu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan Instansi yang diwujudkan dalam produk dan jasa pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani serta nilai – nilai yang dapat diperoleh.

Terkait hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merumuskan Misi dengan memperhatikan relevansi Misi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, sedangkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai induk organisasi dengan tugas dan fungsi yang sama perlu pula diaktualisasikan dalam Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Adapun rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN SECARA TERENCANA, TERPADU, TERKOORDINIR DAN MENYELURUH “.

Penjelasannya :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kota Madiun ;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana ;
3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Sedangkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah :

“ Meningkatkan penanganan bencana yang responsif “.

d. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Ada 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, yaitu :

“Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien”.

e. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian kinerja, berupa masukan, proses, keluaran hasil dan atau manfaat pelaksanaan program kegiatan.

Dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas maka ditentukan beberapa indikator sebagai berikut :

➤ Sasaran :

Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien

➤ Indikator :

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Adapun untuk mengetahui lebih jelas tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa di lihat dalam tabel di bawah ini.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang siap siaga, tanggap dan tangguh menghadapi bencana

Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat Kota Madiun secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.

Tujuan : Meningkatkan penanganan bencana yang responsif.

No	Indikator Tujuan	Rumus	Kondisi awal 2014	Kondisi akhir 2019
	2	3	4	5
1.	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	100 %	100 %

Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran :

<b>Sasaran</b>								
Uraian / Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Kondisi Awal 2014 (%)	Target Tahun ..... (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	100	100	100	100	100	100
		$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$						

Berkaitan dengan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, terdiri dari 1 (satu) Indikator Tujuan, 1 (satu) Sasaran yang mengakomodir 1(satu) Indikator Sasaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

f. Target Kinerja

Sedangkan target selama 5 (lima) tahun yang terdapat pada Renstra 2014-2019 akan kami sajikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %

**2.2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur ;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi ;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang telah disusun oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja BPBD	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	B
2.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien.	1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **2.350.428.000,00** (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Berikut ini Program Kegiatan Tahun 2019 yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 570.200.000,00
2.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 223.800.000,00
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 595.400.000,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 25.000.000,00
5.	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 936.028.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.350.428.000,00</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan good governance juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Selaku pengemban amanah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berkewajiban menyusun atau membuat Laporan Kinerja yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi menyeluruh untuk mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 disusun dalam bentuk laporan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019.

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat dilakukan melalui pengukuran berdasarkan tingkat capaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2019) sebagai berikut :

Tabel 1  
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran				Capaian Kinerja
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien.	1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%

Dari tabel diatas bisa dijelaskan bahwa :

- a. Indikator Kinerja dari sasaran “Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien“ di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana ;
  2. Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam ;
  3. Mitigasi Penanggulangan Bencana.

Untuk Indikator Kinerja “Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)“ antara target dan realisasi 100%, dimana nilai capaian kinerjanya juga mencapai 100%. Hal tersebut karena pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk penanganan bencana / pengurangan resiko bencana yang dimulai saat menerima informasi dari Call Center 112 atau dari warga yang langsung minta bantuan. Dengan sampainya di tempat kejadian bencana petugas langsung melakukan penanganan bencana dan semua selesai tertangani.

Adapun jenis bencana yang tertangani sebagai berikut :

No.	Nama Bencana	Jumlah kejadian	Jumlah yang tertangani
1.	Angin Puting Beliung/Angin Kencang	72 kali	72 kali
2.	Kebakaran	38 kali	38 kali
3.	Pencarian dan Pertolongan	41 kali	41 kali
4.	Banjir/Genangan Air	33 kali	33 kali
5.	Kekeringan	2 kali	2 kali
6.	Sosial	1 kali	1 kali

Foto Kejadian Bencana :

1. Angin Puting Beliung/Angin Kencang



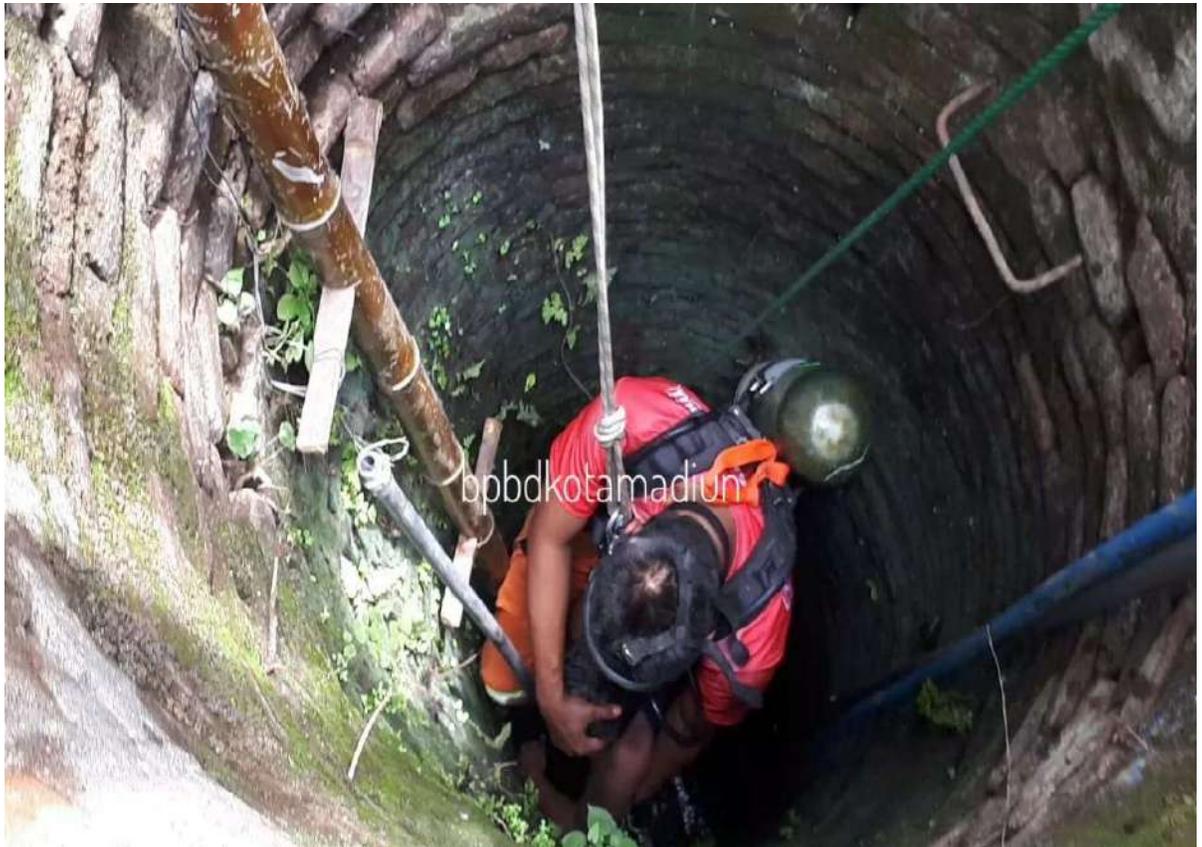
2. Kebakaran



Untuk bencana kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bersifat membantu secara teknis Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) dilapangan dengan melibatkan para Relawan Piket Siaga Bencana guna lebih memaksimalkan peran Relawan ini dalam membantu penanganan kebencanaan. Karena pemadam kebakaran sudah menjadi urusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun.

### 3. Pencarian dan Pertolongan

#### a. Pertolongan orang pingsan dalam Sumur



#### b. Evakuasi sarang tawon



c. Evakuasi Ular



d. Evakuasi Kucing masuk Sumur



#### 4. Banjir



#### 5. Kekeringan



## 6. Sosial



Dalam penanganan bencana juga didukung dengan peralatan penanggulangan bencana yang siap digunakan sesuai peruntukannya pada saat tanggap darurat bencana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Data peralatan tanggap darurat bencana yang siap digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun diantaranya :

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Ranger	1 unit	
2.	Mobil Resque	1 unit	
3.	Mobil Pick Up	1 unit	
4.	Mobil Tangki	2 unit	
5.	Perahu Karet	3 unit	
6.	Sepeda Motor Trail	2 unit	
7.	Mesin Perahu	4 buah	
8.	Mesin Penyedot Air	7 buah	

9.	Mesin Potong Rumput	2 buah	
10.	Mesin Potong Kayu	3 buah	
11.	Mesin Potong Beton	1 buah	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tahun 2014 – 2019).

Tabel 2  
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target (%)	Nilai Kinerja Capaian ..... (%) / Realisasi					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	100	100	100	100	100	100	100

Melihat tabel diatas terlihat bahwa nilai capaian Indikator Kinerja Sasaran dari tahun ke tahun sesuai target, hal tersebut menunjukkan bahwa program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik di dukung pula oleh kegiatan pelayanan kebencanaan secara rutin apabila sewaktu waktu terjadi bencana.

No.	Tahun	Jenis Bencana					Ket.
		Banjir/ Genangan Air	Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang	Pencarian Orang Tenggelam	Kebakaran	Lain - Lain	
1.	2014	2	-	-	26	1	Erupsi Gunung Kelud
2.	2015	3	5	3	28	1	Percobaan bunuh diri

3.	2016	9	15	2	12	1	Percobaan bunuh diri
4.	2017	3	7	1	28	2	Perbantuan (Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Ponorogo Dan Pacitan)
5.	2018	4	15	4	52	6	Animal Resque, Orang bunuh diri, Korban Laka
6.	2019	33	72	-	38	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencarian dan Pertolongan (41) : (Vertical Resque, Animal Resque, Pertolongan Pertama Kecelakaan Transportasi, Pencarian orang hilang, dan Percobaan bunuh diri) ;</li> <li>- Kekeringan (2) : Kelurahan Kelundam Tawangrejo) ;</li> <li>- Sosial (1) : Bentrok Perguruan Silat.</li> </ul>

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut :

Tabel 3  
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra Tahun 2019	Nilai Capaian Kinerja s/d Tahun 2019
1 .	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana	1. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	100%	100%

	secara efektif dan efisien.			
--	-----------------------------	--	--	--

Melihat tabel diatas bisa dijelaskan bahwa Sasaran “Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien” dengan nilai capaian kinerja untuk Tahun 2019 mencapai 100%.

### 3.2. Analisis Dan Evaluasi Kinerja

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Mencermati hasil beberapa perbandingan capaian kinerja yang tersajikan dalam tabel diatas menunjukkan adanya keberhasilan bahkan nihil kegagalan, hal tersebut ditunjang beberapa faktor antara lain :

- a. Kondisi wilayah Kota Madiun dimana luas wilayah Kota Madiun hanya 33,23 Km<sup>2</sup> terbagi dalam 3 (tiga) Kecamatan sehingga memudahkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebencanaan ;
- b. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana seperti Mobil Ranger, Mobil Rescue, Mobil Tangki Air, Perahu Karet, Sepeda Motor Trail dan peralatan penunjang lainnya ;
- c. Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- d. Dukungan Dana dari APBD Kota Madiun ;
- e. Adanya koordinasi dengan Instansi terkait, Lembaga/organisasi kebencanaan serta partisipasi masyarakat ;
- f. Adanya dukungan 30 (tiga puluh) orang Relawan Piket Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala. Kendala pada saat ini adalah belum maksimalnya pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun karena pegawai yang sangat terbatas.

- Analisis Program atau Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, ditindaklanjuti dengan

pelaksanaan Program Kegiatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

a. Program Kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran :

“Meningkatnya Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah“,  
yang terdiri dari :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

b. Program kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran :

“Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien“ terdiri dari :

- Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran yaitu :

1. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana ;
1. Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam ;
2. Mitigasi Penanggulangan Bencana.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan perjanjian kinerja bisa dilihat dalam pengelolaan keuangan Tahun 2019 melalui tabel realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Persentase ( % )
1	2	3	5	6	7
1.	Meningkatnya Kinerja BPBD (Program Pendukung)	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	570.200.000	529.255.019	92.82
		2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	223.800.000	200.862.012	89.75
		3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	595.400.000	584.373.270	98.15
		4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	25.000.000	13.851.829	55.41
2.	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana Secara Efektif Dan Efisien.	1. Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	936.028.000	902.749.023	96.44

Analisis Efisiensi anggaran atas penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Rata - rata capaian kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Efisiensi Anggaran</b>
1.	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana Secara Efektif Dan Efisien	100	96.44	3.56

Dengan melihat tabel diatas dapat dijelaskan rata - rata capaian kinerja dari Sasaran "*Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana Secara Efektif Dan Efisien*" lebih besar nilainya daripada persentase serapan anggaran maka bisa disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Efisiensi Anggaran telah terpenuhi.

Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui besarnya Efisiensi Anggaran, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rata - rata capaian kinerja} - \text{Serapan anggaran} \\
 &= 100 - 96.44 \\
 &= 3.56
 \end{aligned}$$

Faktor Pendorong pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari adanya Dana dan sumberdaya yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun meskipun dengan personil yang terbatas.

Sedang untuk Inovasi atau penghargaan yang pernah diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama Tahun 2019 yaitu mendapat Juara 1 untuk Lomba PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) se Kota Madiun. PPID ini sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Public. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 disusun sebagai gambaran dan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan kegagalan penyelenggaraan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran, tujuan dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun serta dalam mewujudkan good governance yang sudah terealisasi sesuai dengan target dan efisien.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi seluruh komponen, baik dari masyarakat, pemangku kepentingan (Stakeholder) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun para Relawan, sehingga target akhir sasaran dan tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat terwujud.

Berdasarkan capaian kinerja yang sudah tercapai dengan target yang telah ditentukan dan untuk tindak lanjut ditahun berikutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun akan tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas bagi berbagai pihak yang membutuhkan serta sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program kegiatan pada masa yang akan datang.

Madiun, Januari 2020

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

**AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630807 198509 1 003

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 disusun sebagai gambaran dan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan kegagalan penyelenggaraan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran, tujuan dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun serta dalam mewujudkan good governance yang sudah terealisasi sesuai dengan target dan efisien.

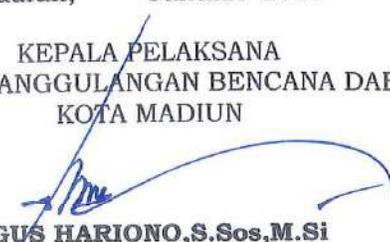
Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi seluruh komponen, baik dari masyarakat, pemangku kepentingan (Stakeholder) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun para Relawan, sehingga target akhir sasaran dan tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat terwujud.

Berdasarkan capaian kinerja yang sudah tercapai dengan target yang telah ditentukan dan untuk tindak lanjut ditahun berikutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun akan tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas bagi berbagai pihak yang membutuhkan serta sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program kegiatan pada masa yang akan datang.

Madiun, Januari 2020

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

  
**AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630807 198509 1 003

## Lampiran - Lampiran

- a. Matriks Renstra
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- c. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- d. Foto Penghargaan

PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Formula (Penjelasan Perhitungan)		Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	Huruf	-		B	BB	BB	Baik
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Persen	Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	X 100%	100%	100%	100%	Baik
		Jumlah kejadian bencana						

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

**AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630807 198509 1 003

PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Formula (Penjelasan Perhitungan)	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	Huruf	-	B	BB	BB	Baik
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Persen	Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	X 100%	100%	100%	Baik
			Jumlah kejadian bencana				

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

  
**AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630807 198509 1 003

